

## IDEOLOGI DALAM BERITA POLITIK INDONESIA OLEH *SYDNEY MORNING HERALD*

Ribut Surjowati\*

**ABSTRACT.** This article presents the analysis of the ideology in the headlines in *Sydney Morning Herald* which report political news in Indonesia. The writer would like to find out the ideology presented by Sydney morning Herald through the lexical choices and syntactical features while reporting Indonesia Political news because it cannot be denied that Australia as the country where Sydney morning Herald was born, has some roles in the internal problem of Indonesia, therefore it is assumed that in reporting the news, this newspaper will be influenced by the situational context and socio historical context where and when the news were written. The data used in this research is the headline of the news about Papua Conflict started from 2006 until 2012. The writer used CDA as a tool to reveal these ideologies. From 9 articles analyzed, the result of the study showed that mostly, according to *SMH*, Australia looked at the conflict of Papua as the complex problems which involved not only the Indonesia government. *SMH* gives negative evaluation towards the conflict there. *SMH* sees that Australia supports that humans have freedom to choose their own will, therefore, the writer sees that Australia supports Papuans to fight for their independence.

**Key terms:** Analisis wacana kritis, *Sydney Morning Herald*, Ideology

### PENDAHULUAN

Kekuasaan dan ideologi dapat tercermin dalam pilihan kata yang dipakai dalam media masa, sehingga kata mempunyai kekuatan untuk membatasi kesan masyarakat tentang peristiwa-peristiwa yang diberitakan dalam media masa. Ideologi menurut Karl Marx (1818-1883) dan Friederich Engels (1820-1895) adalah febrasi atau pemalsuan yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk membenarkan diri mereka sendiri. Menurut mereka, Ideologi atau gagasan politik dominan disetiap masyarakat akan selalu mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelas yang berkuasa.

Gramsci menambahkan bahwa ideologi bukanlah sekedar sistem ide. Ideologi bersifat historis yaitu ideologi diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Ideologi mengatur manusia, ideologi bukanlah perorangan namun menjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat (Simon, 2000:83). Ketika ideologi ditunjukkan dalam bahasa khususnya bahasa yang digunakan oleh media masa, itu berarti bahwa bahasa itu sendiri mempunyai kekuasaan, kekuasaan untuk merepresentasikan ideologi dari editor atau penulis berita.

Alat atau metode yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah ideologi ini yang terepresentasikan dalam sebuah teks atau judul utama (*headlines*) dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis wacana kritis. Analisis Wacana Kritis (CDA) melihat pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dalam CDA dipandang menyebabkan hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial. Konsep ini di pertegas oleh Fairclough dan Wodak yang melihat praktik wacana bias jadi menampilkan efek ideologis artinya wacana dapat memproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas dimana perbedaan itu direpresentasikan dalam praktik sosial.

Dalam artikel ini, penulis ingin melihat bagaimana media Australia melihat pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dengan Analisis Wacana Kritis (CDA) penulis dapat melihat bagaimana media Australia melihat Indonesia, sehingga penulis akan mendapatkan perspektif yang lebih luas

---

\* Ribut Surjowati, M. Pd., dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

tentang cara pandang Australia terhadap permasalahan Indonesia. fokus penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang: 1) pilihan kata yang dipakai oleh media *SMH* yang mengungkapkan ideologi, 2) susunan kalimat yang dipakai oleh *SMH* yang mengungkapkan ideologi, 3) latar belakang bagi wartawan media *SMH* untuk mengungkapkan ideologi tersebut.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif qualitative karena mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan dan menganalisis judul utama (*headline*) dalam media masa Australia: *SMH*. Sebagai penelitian kualitatif, maka instrumen dari penelitian ini adalah peneliti sendiri. (Robert K Yin, 2011) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Meskipun data kejadian-kejadian yang diukur bersifat eksternal, peneliti akan menggunakan persepsinya dalam melaporkan hasil analisisnya. Subyek penelitian adalah 9 berita politik Indonesia yang ditulis oleh *SMH*. Obyek penelitian adalah ideologi dan kekuasaan yang terepresentasikan dalam pemberitaan mengenai Indonesia.

Pengumpulan data untuk penelitian ini mengikuti pandangan Walcott (1994: 3), yang menyatakan bahwa data adalah sesuatu yang dikumpulkan, tergantung pada penelitian yang dibuat. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa segala sesuatu secara potensial bisa menjadi data tetapi untuk bisa menjadi data dibutuhkan campur tangan dari peneliti. Pada penelitian ini, sumber data yang dipakai adalah media masa *Sydney Morning Herald Australia*. Data yang dikumpulkan adalah *Headline* yang ditulis dalam *SMH*, yang memuat berita politik mengenai Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan beberapa *headline* dari media masa tersebut dan *headline* yang dikumpulkan adalah yang bertema Konflik Papua yang muncul pada media masa *SMH* mulai tahun 2009 sampai 2011. Setiap data diberi kode berdasarkan topik tentang tema berita, tanggal, bulan dan tahun cetak. Contohnya: berita yang berjudul "*A New Worm Inside the New Indonesia*" berisi tentang konflik di Papua tentang usaha pendirian Papua merdeka. Berita ini diterbitkan di *SMH* pada bulan Februari, 26, 2011. Sehingga sistem pengkodeannya akan menjadi *SMH/PC/2/26/11*.

Teknik Analisis Data melibatkan analisis kritis. Salah satu aspek penting dalam analisis berita kritis adalah implikasinya (Van Dijk dalam Jensen dan Jankowski, 1993: 113). Van Dijk mengatakan bahwa informasi dalam sebuah berita di media masa tidak diungkapkan secara eksplisit tetapi diungkapkan secara implisit. Kosakata, klausa dan ungkapan-ungkapan tekstual bisa mengungkapkan konsep yang mungkindiinterpretasikan menurut latar belakang sejarahnya. Dengan demikian fitur-fiturwacana ini mempunyai dimensi ideologi dan setiap berita yang dilaporkan selalu mempunyai gaya yang berbeda dalam menunjukkan ideologi penulisnya kepada pembaca. Untuk mengungkapkan maka, pendapat maupun ideologi yang terdapat pada *headline*, penulis menganalisis berdasarkan pada konteks cognisi, sosial, politik dan budaya. Pendekatan kognitif sangat penting karena fakta menunjukkan bahwa sebuah teks tidak mempunyai makna tetapi diberi makna oleh pengguna bahasa tersebut atau lebih spesifiknya oleh proses mental dari pengguna bahasa tersebut. Akhirnya, payung untuk menganalisis data tersebut adalah dengan Analisis Wacana Kritis Fairclough. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang terkumpul akan direduksi artinya akan kita pilih sesuai dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Setelah data terkumpul, maka akan di display untuk kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode wacana analisis kritis dari Fairclough yang meliputi 3 tahapan yaitu deskripsi, interpretasi dan eksplanasi.

## HASIL

Ada sembilan data yang dianalisis oleh peneliti yaitu data *SMH/12/04/06*, *SMH/PC/26/04/06*, *SMH/PC/16/1/09*, *SMH/PC/18/10/10*, *SMH/08/11/10*, *SMH/PC/20/10/10*, *SMH/PC/26/02/11*, *SMH/PC/17/03/12*, *SMH/PC/08/06/12* (lihat lampiran).

### Analisis Leksikal

Data 1: *SMH/12/04/06 Indonesia urges leaders' summit on papua crisis*

Pada data ini, terdapat kata yang memuat nilai-nilai ideologi yaitu *urges* and *summit*. Terkait dengan tindakan Australia dalam menangani pengungsi Papua, bangsa Indonesia merasa bahwa diperlukan suatu pertemuan dengan pemerintah Australia. Kata *urge* berarti *to push for*. Dengan penggunaan *push for* atau *urge* berarti bahwa ini merupakan suatu keharusan. Demikian juga dengan pilihan kata *summit* yang memiliki makna *meeting between the leaders of two countries to discuss important matters* atau pertemuan penting yang hanya dihadiri oleh pemimpin negara untuk membahas masalah yang penting. Kata *summit* dalam konteks ini berarti bahwa pertemuan itu sangat penting dilaksanakan mengingat terjadi perselisihan antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam penanganan sebagian sebagian rakyat Papua yang melarikan diri dari Indonesia. Kata kerja yang bermakna ideologi adalah *crisis*, menurut wartawan bahwa Papua mengalami sebuah krisis

Data 2: (*SMH/PC/26/04/06*) **Leaders seek face-saving formula over Papua**

Data di atas berisikan penggunaan kata *Leaders* dan *face-saving*. Kedua kata tersebut mengandung muatan ideologi dari penulis berita. Kata "leaders" dalam hal ini mempunyai makna yang lebih dari satu, bisa berarti pemimpin negara Australia dan pemimpin negara Indonesia. Ini yang disebut Hyponymy menurut Fairclough (1986,116) bahwa satu kata mencakup makna dari kata yang lain. Sehingga "leaders" bisa mencakup *Indonesian leaders* atau *Australian leaders*. Hal ini sangat erat hubungannya dengan maksud penulis, tentang siapa yang berusaha untuk mencari jalan damai dalam menangani perselisihan antara kedua negara tersebut. Dia juga menggunakan kata "face-saving" yang artinya damai dalam konteks ini. Seolah-olah bahwa pemimpin yang dimaksud itu mencari solusi damai dalam perselisihan konflik ini. Tidak disebutkan secara jelas apakah benar-benar damai atau ada maksud tertentu.

Data 3: (*SMH/PC/16/1/09*) **Australian Intruders in Papua sent to jail**

Data *SMH/PC/16/1/09 Australian intruders in Papua sent to Jail*, wartawan menggunakan kata yang mengandung nilai *expressive* yaitu *intruders* dan *sent to jail*. Kedua frasa tersebut mengandung nilai ideologi karena kata *intruders* berarti penyelundup. Sebenarnya wartawan tersebut bisa menggunakan kata yang lain seperti *illegally landing* sehingga menjadi *Australians illegally landing their plane in Papua sent to jail*. Pilihan kata *illegally landing* tidak mengandung muatan politik apabila dibandingkan dengan kata *intruders* karena memang pelaku bukanlah seorang penyelundup yang sebenarnya. Demikian pula dengan pilihan frasa *sent to jail*. Frasa ini mengandung muatan ideologi karena disitu tersirat adanya sikap wartawan terhadap peristiwa ini yaitu bahwa pelaku yang terlibat pendaratan ilegal dipenjara. Dalam prosesnya kelima warga Australia tersebut masih belum menjalani hukuman penjara tetapi mereka sedang menjalani tahanan rumah.

**Data 4: (SMH/PC/18/10/10) Video shows Papuans being tortured**

Dari data tersebut pemilihan kata “tortured” menunjukkan nilai ideologi. Kata ini dipakai untuk menggambarkan suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan bahwa penghilangan nyawa orang lain. *Tortured* juga menunjukkan penilaian wartawan terhadap tindakan tersebut sangat tidak manusiawi. Selanjutnya berita lanjutan tentang kekerasan di atas terdapat pada data 5 berikut yang mengemukakan tentang proses peradilan para pelaku.

**Data 5: SMH/PC/08/11/10 Deceived: Papua trial does not include video torturers**

Pemilihan kata *deceived* yang artinya menipu, tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya, disini mengandung muatan ideologi dan muatan politik bahwa apa yang terjadi di pengadilan 4 anggota TNI merupakan sebuah rekayasa untuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Bahwa anggota keamanan yang seharusnya bertugas menjaga rakyat Papua melakukan pelanggaran dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat di sana. Bahwa bukti tidak diperlihatkan karena dapat memberatkan terdakwa. Sementara dalam konteks ini wartawan memberikan evaluasinya tentang peristiwa ini bahwa ada kecurangan dan ketidak sungguhan dalam mengadili anggota TNI yang telah membantai masyarakat Papua. Hal yang sama terdapat pada data 6.

**Data 6: SMH/PC/20/10/10 Brutality in Papua will continue, expert warns.**

Pada data ini, wartawan menggunakan beberapa kata yang mempunyai makna ekspresif which have *expressive value* namely ‘brutality’ and warns’. *Brutality* mempunyai arti yang sesungguhnya yaitu kekerasan. Dalam konteks ini kekerasan terjadi di Papua Barat yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Indonesia. Penggunaan dan pemilihan kata berikutnya yang memiliki nilai expressive adalah kata ‘warn’. Dalam bahasa Indonesia *warns* berarti memperingatkan. Dalam konteks ini seorang ahli memperingatkan akan terjadinya kekerasan berlanjut di Papua Barat. Penggunaan kata *warn* dihubungkan dengan peristiwa yang tidak mendapatkan support dari masyarakat dunia, sehingga perlu adanya peringatan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan tersebut.

**Data 7: (SMH/PC/26/02/11) A worm inside the new Indonesia**

Artikel *a worm inside the new Indonesia* bercerita mengenai konflik antara Papua dan pemerintah Indonesia. Papua dianggap sebagai medan perang antara *a ‘new’* dan *‘old’* Indonesian. Gerakan Papua Merdeka (GPM) menamakan dirinya sebagai ‘new Indonesia’ menganggap bahwa selalu terjadi pembantaian oleh masyarakat Papua yang dilakukan oleh tentara Republik Indonesia. Oleh wartawan asing ini ditulis dengan judul *‘a worm inside new Indonesia.’* Wartawan memilih kata *worm* yang memiliki nilai metaforik berarti cacing dalam bahasa Indonesia. *Worm* mempunyai makna yaitu binatang yang menjijikkan dan hidup sebagai parasit Dalam konteks ini semua yang menghalangi perjuangan Papua untuk merdeka disebut *worm*. Pilihan kata *new* Indonesia bermakna bahwa ada dua Indonesia yaitu *old* dan *new* Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh wartawan bahwa *Papua has become a battleground between a new and old Indonesia*. Sehingga penulis menganggap bahwa Papua sudah merdeka dan menjadi *new Indonesia*. Karena itulah kedua kata ini memuat nilai nilai ideologi.

**Data 8: (SMH/PC/17/03/12) Anger greets jailing of West Papua activists**

Ungkapan yang mempunyai makna dinegatifkan adalah kata ‘greets’ dan activists’. Dalam arti yang sesungguhnya ‘greets’ mempunyai makna menyapa. Dengan menyapa, membuat orang, tersenyum tetapi *greets* dalam konteks ini artinya menyelimuti/memenuhi ruang pengadilan di mana kelima aktivis itu disidang. Saat kelima aktivis itu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun oleh pengacara mereka, dianggap karena ada campur tangan dari dunia internasional dan inspeksi

mengenai kasus ini namun demikian kemarahan tetap terjadi dan memenuhi ruang sidang saat vonis terjadi karena kegiatan mereka tidak dapat dikatakan sebagai tindakan makar karena tidak ada gerakan bersenjata, tidak ada pemerintahan alternative karena apa yang mereka lakukan hanyalah simbolik.

Pemilihan kata 'activists' juga bernilai negative karena mempresentasikan sebuah kelompok yang gerakan papua merdeka (OPM) yang berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI. Penggunaan kata activists berawal dari kata kerja 'activity' yang artinya kegiatan. Jadi 'activists' sendiri mempunyai arti orang-orang yang melakukan kegiatan. Biasanya kalau menyebutkan kata 'activists', interpelasi kita mengacu pada gerombolan orang-orang yang beraktivitas di luar perintah resmi dari negara dalam konteks ini, activists mewakili OPM. Sebagaimana kata activist pada data SMH/PC/08/06/12.

### Analisis sintaksis

Berdasarkan sembilan data yang terkumpul, kalimat yang dipakai oleh wartawan SMH terdiri dari kalimat aktif menunjukkan non-directed action, action process, event process deklaratif "relational modality", pasif.

### Kalimat aktif: non-directed action, action process dan event process

Susunan kalimat dari data SMH/PC/12/04/06 *Indonesia urges leaders' summit on Papua crisis*. Surat kabar di atas adalah berupa kalimat aktif yang mana Indonesia sebagai subyek dan terdiri dari subyek, kata kerja dan obyek atau Fairclough (1989) agent, verbs dan "patient". Agent dari kalimat tersebut jelas terlihat tetapi dalam bentuk "inanimate" yaitu Indonesia yang merupakan nama sebuah negara. Kesembilan artikel yang digunakan sebagai data berbentuk kalimat aktif yang terdiri dari *agents* dan *patients*. Kalimat aktif dapat menunjukkan *non-directed action* seperti pada data SMH/PC/20/10/10, dimana hanya ada satu partisipan dan tidak terlihat jelas obyek yang dikenai sasaran. Terlihat ada proses nominalisasi dalam susunan kalimat di atas yaitu *brutality* yang dijadikan kata benda dan berfungsi sebagai subyek. Pada lain data SMH/PC/26/02/11, SMH/PC/08/06/12, SMH/PC/26/04/06 terdapat *action process* yang mana ada dua partisipan dalam susunan kalimat yang masing masing yaitu *a worm and the new Indonesia, activists dan army*. Sementara itu *event process* terdapat pada data SMH/PC/17/03/12 *Anger greets jailing of West Papua, karena* disini ada hanya satu pelaku yaitu "anger". Sementara "anger" sendiri menjadi sebuah "agent" karena adanya proses nominalisasi, dari kata sifat menjadi sebuah kata benda. Sehingga "anger" disini berfungsi sebagai subyek sebuah kalimat.

### Deklaratif Relational Modality

Data SMH/PC/12/04/06 terlihat pula bentuk kalimat deklaratif yang mengandung "relational modality" karena dalam kalimat tersebut terdapat muatan sebuah kekuasaan untuk memerintah partisipan yang lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana terlihat dalam kata "urges" yang artinya dalam konteks ini mendesak. Sehingga kalimat *Indonesia urges leaders' summit on Papua crisis* dapat mempunyai arti bahwa bangsa Indonesia mendesak adanya pertemuan antar pemimpin untuk membahas masalah Papua. Kata mendesak dipilih oleh wartawan SMH ini untuk mendeskripsikan bahwa pertemuan itu sangat penting dilakukan. Bentuk modality yang lain adalah expressive modality dengan menggunakan modal *auxiliary will* sebagaimana terdapat pada data SMH/PC/20/10/10. Bentuk ini untuk menggambarkan bahwa sebuah kekuasaan bahwa *brutality* yang dilakukan pemerintah Indonesia akan berlanjut.

### **Kalimat Pasif**

Data *SMH/PC/16/1/09 Australian Intruders in Papua sent to jail* di atas mempunyai susunan deklaratif yaitu terdiri dari subyek dan kata kerja serta pelengkap. Tetapi apabila di lihat makna secara seksama kalimat pada data di atas, tampak seperti kalimat pasif tanpa menyebut pelaku dari kegiatan tersebut, seharusnya *Australian intruders in Papua were sent to jail*. Di sini wartawan sengaja menghilangkan pelaku dari kegiatan untuk meninggalkan kesan pelaku yang bertanggung jawab dalam pengiriman warga Australia tersebut ke penjara. Bentuk yang sama dapat dilihat pada data *SMH/PC/20/10/10* yang mana data ini seharusnya berbunyi *brutality in Papua will be continued, expert warns*. Dengan menghilangkan *be* maka pelaku tersamarkan.

### **Negation**

*Negation* dapat ditemui pada data *SMH/PC/08/11/10 Deceived: Papua trial does not include video tortures*. Kalimat di atas disusun dalam bentuk kalimat negatif dengan bantu kata kerja *does not* yang menunjukkan bahwa sesuatu berbeda dengan fakta yang seharusnya yaitu pelaku yang dalam bentuk *inanimate* seharusnya menyertakan video yang menunjukkan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Kalimat di atas juga disebut *attribute process* karena hanya ada satu partisipan yaitu Papua trial sementara video torturers berfungsi sebagai *attribute*. Bentuk kalimat tersebut adalah deklaratif yang mana subyek memberikan sebuah informasi dan dalam konteks ini, yang bertindak sebagai subyek adalah Papua trial yang memberikan informasi bahwa tidak ada rekaman penyiksaan sebagai bukti dalam persidangan.

## **PEMBAHASAN**

Mengacu pada teori Fairclough dalam bukunya *Language and Power*, bahwa dalam menganalisis sebuah kekuasaan bahasa dan ideologi yang terkandung di dalamnya, maka pada tahapan interpretasi ini kita bisa melihat pilihan kata yang merepresentasikan sebuah ideologi. "Interpretation are generated through a combination of what is in the text and what is in the interpreter" (Fairclough, 1989: 143). Artinya bahwa tahap interpretasi adalah tahap dimana terjadi penggabungan antara apa yang ada di teks dan apa yang ada di pemikiran pembaca. Karena penulis bukan menganalisis teks dalam surat kabar atau media masa tetapi hanya *headlinenya* saja maka akan interpretasi difokuskan pada *headline* tersebut. Van Dijk (1998) menambahkan bahwa pada tahap kedua ini yang disebut interpretasi, Van Dijk menyebutnya sebagai pendekatan sosio-kognitif dimana dalam melakukan interpretasi, seseorang akan menghubungkannya dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap-sikap dan pendapat-pendapat sosial. Dalam tahap ini seseorang akan melihat latar belakang pemilihan kata dan susunan kalimat yang dipakai. Untuk itu analisis akan melibatkan konteks sosio-historis pada saat berita itu ditulis serta melihat kepemilikan *SMH*.

### **Australia Berkepentingan Politik Terhadap Masalah Papua**

Sebagai negara tetangga, Australia memandang negaranya merasa perlu bercampur tangan dalam membantu setiap masalah politik di Indonesia. Hal ini karena Australia menganggap apabila konflik di wilayah Indonesia diabaikan, akan berdampak pada kedaulatan Australia sebagai tetangga terdekat. Salah satu masalah politik yang masih berlangsung saat ini adalah konflik Papua. Dari data *SMH/12/04/06 Indonesia urges leaders' summit on papua crisis* terdapat kata yang memuat nilai-nilai ideologi yaitu *urges and summit*. *Urges* juga bentuk relational modality, dalam bahasa Indonesia berarti mendesak, digunakan oleh wartawan penulis berita ini merepresentasikan bahwa sesuatu yang penting perlu dilakukan karena apabila tidak dilakukan akan memberikan dampak yang mengkhawatirkan. Dalam konteks ini negara Australia dianggap terlalu ikut campur dalam konflik internal bangsa Indonesia yaitu dengan memberikan suaka pada sebagian rakyat Papua yang

melarikan diri ke Australia sementara pengejaran yang dilakukan oleh aparat keamanan RI dicegah oleh pemerintah Australia. Hal tersebut dianggap tidak adil oleh Jakarta sehingga Jakarta mendesak Canberra untuk segera berunding.

Pemakaian kata *summit* juga mengisyaratkan bahwa pertemuan yang harus dilakukan tersebut tidak dapat diwakilkan dan harus dihadiri oleh pimpinan masing-masing negara karena membahas kehormatan dan kedaulatan negara. Sebenarnya penggunaan kata *crisis* oleh wartawan kurang tepat karena menurut pihak Indonesia, persoalan di Papua sudah dianggap selesai dan tidak perlu lagi ada perundingan. Yang tertinggal hanyalah persoalan penerapan otonomi khusus kepada propinsi ini. Dari sini terlihat bagaimana wartawan melihat masalah Papua. Dengan mengevaluasi bahwa Papua masih dalam kondisi kritis berarti bahwa dia berada dalam satu garis dengan pemerintah Australia yang secara eksplisit memberi dukungan terhadap kemauan rakyat Papua. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan suaka atau menerima rakyat Papua yang melarikan diri dari Indonesia serta tidak mengizinkan Indonesia untuk memanggil orang-orang tersebut.

Dari susunan kalimat terlihat bahwa pelaku disebutkan secara jelas yaitu *Indonesia*. Ini berarti bahwa yang mendesak untuk dilakukan perundingan adalah pemerintah Indonesia bukan pemerintah Australia. Dikatakan bahwa Indonesia terlalu memberikan reaksi yang berlebihan terhadap sikap Australia kepada rakyat Papua yang melarikan diri ke negaranya. Apabila wartawan tidak menyebutkan pelaku (agent) yang mendesak diadakannya pertemuan pemimpin tersebut, maka hal tersebut akan tampak lebih fair dan balance karena kalau dilihat dari sisi kedua belah pihak, Australia melakukan sesuatu yang menurut pemerintah Indonesia terlalu ikut campur masalah Papua.

Keinginan Indonesia untuk menghentikan Australia dari campur tangannya terhadap masalah Papua tercermin dalam data *SMH/PC/26/04/06 Leaders seek face-saving formula over Papua*. Pada data tersebut berbentuk kalimat aktif yang menyatakan *action process*, terdapat penggunaan kata *Leaders* dan *face-saving*. Kedua kata tersebut mengandung muatan ideologi dari penulis berita. Kata “leaders” dalam hal ini mempunyai makna yang lebih dari satu, bisa berarti pemimpin negara Australia dan pemimpin negara Indonesia. Ini yang disebut Hyponymy menurut Fairclough (1986,116) bahwa satu kata mencakup makna dari kata yang lain. Sehingga “leaders” bisa mencakup *Indonesian leaders* atau *Australian leaders*. Sedangkan bentuk *action process* lebih menekankan adanya tindakan untuk menyelesaikan masalah antara dua negara tersebut walaupun subyek disamarkan. Tampaknya ada keinginan dari *SMH* untuk tidak menunjukkan keinginan Indonesia menyelesaikan masalah Papua sehingga disamarkan dengan *Leaders*.

Pemilihan kata tersebut dilatar belakangi oleh sikap Indonesia yang kurang senang terhadap pemerintah Australia dalam memberikan suaka terhadap rakyat Papua yang melarikan diri, sehingga bisa dilihat bahwa Australia berada pada posisi yang kurang bagus atau sebagai tersangka, oleh sebab itu *headline* hanya ditulis dengan *leaders* agar informasi tentang ini bisa tersamarkan. Yang dimaksud dengan *face-saving* sendiri adalah upaya damai untuk memecahkan masalah.

Dalam konteks ini adanya penyamaran pihak mana yang melakukan upaya damai itu. Apakah benar upaya damai atau kepentingan politis saja karena Australia berusaha menetralkan perselisihan dengan jalan menawarkan satu alternative lain yaitu dengan cara memberikan sumbangan dana untuk mengimplementasikan otonomi khusus di Papua. Sehingga bisa dikatakan bahwa latar belakang pemilihan dan penggunaan kata tersebut adalah karena adanya suatu keinginan dari penulis berita untuk memberikan kesan bahwa Australia adalah negara yang selalu terbuka untuk perdamaian apalagi Australia menganggap Indonesia sebagai negara tetangga yang menguntungkan dari segi ekonomi maupun politik dan Australia akan mendapatkan dampak yang kurang bagus bagi integritas negaranya apabila negara Indonesia terpecah belah menjadi beberapa negara bagian.

### Australia Menginginkan Kemerdekaan Papua

Wartawan *SMH* menggunakan kata *worm* data **PC/26/02/11** *a worm inside the new Indonesia* untuk mengungkapkan adanya sebuah kekacauan di tanah Papua. *Worm* dalam bahasa Indonesia berarti cacing. Cacing adalah binatang kecil melata yang dianggap sebagai sumber penyakit. *Worm* mempunyai makna konotatif dan mendapatkan persepsi tersendiri dari wartawan, sehingga bentuk kalimat deklaratif ini memberikan informasi kepada pembaca tentang kondisi negara “Indonesia Baru”. Dari berita yang dia tulis **a worm** disini secara tersirat mengacu pada pasukan keamanan republik Indonesia. Pasukan ini dianggap menghalangi rakyat Papua untuk memisahkan diri dari pemerintah Indonesia.

Masing masing kubu menganggap bahwa pembantaian yang katanya dilakukan oleh tentara Indonesia merupakan sebuah insiden dan bukan perintah langsung dari pimpinan tertinggi, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan didukung oleh Revolt Chauvel dari Universitas Victoria Melbourne. Dia mengatakan bahwa:

*‘the conference Jakarta feels Papuan independence is not seen as the threat it was a decade ago when a ‘Papuan spring’ of breakaway sentiment and protest followed East Timor’s departure. The territory has been broken into two provinces so far, and numerous district governments, Papuan separatists fragmented and no state bar Vanuatu is questioning Indonesian sovereignty.*

Bahwa hak untuk merdeka bagi rakyat Papua dianggap sebagai sesuatu yang memalukan kedaulatan Indonesia sehingga dalam jajak pendapat yang dilakukan pada sekitar tahun 2006 dipenuhi dengan intimidasi, penyuapan yang dilakukan oleh Pro Indonesia supaya rakyat tetap memilih bergabung dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditulis:

*‘West Papua’s act of free choice was seen as farce from the beginning. As the historians Pieter Drooglever in Holland and John Saltford in Britain have documented, monitors were kicked out of the territory by the Indonesians in the seven-year interval between the Dutch departure and the ‘act’ – which was a unanimous public vote by an assembly of 1022 handpicked, bribed and intimidated Papuans in favour of integration with Indonesia.*

Pilihan kata berikutnya yang mencerminkan adanya keinginan Australia terhadap kemerdekaan Papua adalah adanya kata **new Indonesia**. Dengan menggunakan kata *new* seolah olah bahwa memang Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu Indonesia lama dan baru. *Old Indonesia* merepresentasikan pemerintah Indonesia dan *new Indonesia* merepresentasikan Papua yang dianggap sudah merdeka bukan merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia (NKRI).

Kata **new** disini dianggap juga sebagai sebuah *euphemistic expressions* yaitu sebuah kata yang digunakan untuk menggantikan kata untuk menghindari arti negative (Fairclough, 1989: 117). Sehingga kata **new** sebenarnya disini menggantikan sebuah kelompok Gerakan Papua Merdeka atau GPM. Kalau wartawan menggunakan istilah GPM, maka itu memberikan makna negatif karena kata **gerakan** mempunyai makna gerombolan atau sekelompok orang yang melakukan suatu aktivitas dalam hal ini aktivitas menuntut merdeka dari pemerintah Indonesia.

Disini tampak perspektif ideologi yang disampaikan kepada pembaca dari sikap penulis yang terepresentasikan melalui *headline* bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ideologi yang ingin diusung adalah liberalism yang mana bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dan harus diperlakukan yang sama. *Schwarzmatel, (2008: 50) adds that liberalism has fundamental concepts, those are individual rights, individual choice, the limiting of state power, and the important role of the market.* Masyarakat Papua dianggap layak

untuk mendapatkan kebebasan atas tanah yang mereka miliki dari nenek moyangnya. Dan selama ini sumber kekayaan alam Papua dikuasai oleh pemerintah pusat termasuk tanah, hutan, tambang dsb. Eksploitasi kekayaan alam dan kurang perhatiannya pemerintah pusat dianggap telah memperburuk kondisi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

### **Kemerdekaan Rakyat Papua Merupakan Sebuah Cita-Cita Yang Harus Dihormati**

Dari data *SMH/PC/08/06/12 Activists and army clash in troubled West Papua* yang ditulis *SMH* tersebut, kita memperhatikan penggunaan kata *activists* dan *army*. Masing-masing kata tersebut mempunyai makna yang berbeda walaupun ditulis dalam tingkatan yang sama. Penggunaan kata *activists* ini adalah bentuk euphemism karena sebenarnya kata tersebut mewakili kelompok separatis gerakan Papua merdeka. Menurut hukum gerakan ini adalah gerakan ilegal yang pada dasarnya sama dengan penjahat politik. Tetapi oleh *SMH* kelompok ini disamakan dengan pasukan militer Republik Indonesia yang merupakan pasukan resmi negara yang berdaulat.

Hal tersebut dilakukan sebagai representasi negara Australia yang secara implisit mendukung aktivitas organisasi politik ini, sehingga dia melihat gerombolan itu bukan layaknya sebagai kelompok yang membahayakan kedaulatan suatu negara tetapi sebagai kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama dan terhormat seperti pasukan TNI Republik Indonesia.

Australia sebagai negara yang menganut ideologi liberal-demokrasi tampaknya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak untuk meraih kebebasan bernegara. Karena dari pemberitaan yang disoroti adalah kesewenangan pasukan militer Indonesia dan korban yang disebabkan oleh kesewenangan itu. Sedangkan kebrutalan dari para aktivis tidak diulas secara rinci. Sekali lagi ini adalah bentuk bagaimana Australia memihak GPM. Kalau kita melihat sejarah hubungan politik antara Indonesia dan Australia, kedua negara ini sempat mengalami ketegangan sejak lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang tidak lepas dari peran Australia juga.

Pemilihan kata *clash* juga merupakan sebuah indikasi tentang dukungan Australia terhadap OPM. *Clash* berarti berselisih yang mana dalam perselisihan ini kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama. Padahal pada kenyataannya antara OPM dan pasukan militer Indonesia mempunyai kedudukan yang berbeda. Seperti yang disebutkan diatas bahwa OPH dapat disamakan dengan penjahat politik yang mengacaukan kedaulatan bangsa sedangkan pasukan TNI adalah pasukan resmi negara Republik Indonesia. Jelas keduanya mempunyai kedudukan dan peran yang berbeda. Secara sintaksis, penulis berita menyebutkan pelaku perselisihan ini sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab dalam masalah ini.

Perlawanan aktivis pro Papua merdeka dengan pasukan NKRI sebelumnya juga mendapat sorotan dari *SMH* yang melaporkan adanya rekaman video tentang penyiksaan itu. Artikel dengan judul **Video shows Papuans being tortured (SMH/PC/18/10/10)** menunjukkan bagaimana sebuah penyiksaan dilakukan. Dengan tidak menunjuk siapa yang bertanggung jawab karena bentuk kalimatnya adalah kalimat pasif dengan tanpa menyebutkan pelaku.

Hal yang sama dapat dilihat pada headline yang berjudul **Brutality in Papua will continue, expert warns (SMH/PC/20/10/10)**. Dalam artikel yang ditulis oleh wartawan *SMH* ini juga menyebutkan tentang kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan NKRI dan menurut seorang pakar hal ini bisa berlanjut karena masing-masing kubu dari pemerintah Indonesia dan OPM memiliki argumentasi yang berbeda.

### **Indonesia Melanggar Hak Asasi Rakyat Papua**

Dalam menghadapi konflik di Papua, Indonesia beranggapan bahwa apa yang dilaporkan oleh surat kabar termasuk surat kabar asing tidak sepenuhnya benar karena apabila insiden itu benar terjadi, hal itu tidak dilakukan secara sistematis. Indonesia sudah menyatakan bahwa sebenarnya

persoalan Papua sudah selesai karena sudah ditetapkan oleh PBB bahwa Papua Barat tetap berada di bawah pemerintahan NKRI dengan pemberian otonomi khusus (Otsus) tetapi apabila terjadi kekerasan sebagaimana yang di tulis oleh SMH di lapangan itu dianggap merupakan sebuah insiden. SMH menyebut pengadilan tersebut sebagai suatu penipuan karena ada indikasi penghilangan alat bukti yang memperlihatkan penyiksaan oleh pasukan keamanan NKRI sebagaimana terdapat pada data SMH/PC/08/11/10 Deceived: Papua trial does not include video torturers.

Sebagai surat kabar independen dalam menulis sebuah berita, pemerintah Australia tidak melakukan campur tangan sebagaimana disebutkan bahwa wartawan mempunyai kebebasan yang luas untuk melaporkan setiap aspek dalam masyarakat yaitu: politik, budaya, kriminal dan bencana (Ward, 2002). Tetapi perlu disadari bahwa pemilik surat kabar ikut memberikan andil terhadap isi berita yang ditulis wartawan, sebagaimana yang di tuliskan bahwa:

*In Australia, the control of information, whether withholding or filtering, does not normally come from the government, because the government generally has no direct power to force newspapers to publish or withdraw information. The major threats to information flow come from three areas: interference of proprietors, bias of journalist and editor and self-censorship.*

Jadi sebenarnya ancaman terhadap ke seimbangan berita datang dari pemilik surat kabar, editor atau *self-censorship*. Dalam penulisan berita di atas tampaknya SMH memberikan pernyataan yang subyektif dengan memilih kata *deceived* yang berarti menipu dan terjadi pada persidangan untuk kasus kekerasan ini seperti terlihat pada data SMH/PC/08/11/10 Deceived: Papua trial does not include video torturers

Dengan melihat moto SMH, bahwa SMH wished to be the voice for the people, not of the people. Dengan mengatakan bahwa terjadi penipuan dalam persidangan Papua, SMH dengan jelas menyuarakan suara untuk rakyat Papua bukan pemerintah Indonesia yang berkuasa.

Data SMH/17/03/12 *Anger greets jailing West Papua Activist* mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia dimana terdapat tindakan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam persidangan empat anggota pro Papua merdeka diperlihatkan oleh pemerintah Indonesia sehingga menyebabkan kemarahan dari pendukung pro Papua merdeka, dalam proses persidangan sebagaimana dilaporkan oleh SMH.

Latar belakang keinginan untuk merdeka itu yang menyebabkan kelima aktivis tersebut ditangkap dengan tuduhan makar. Berita ditulis oleh SMH dengan judul *anger greets jailing of West papua activists* memberikan suatu gambaran bahwa peradilan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak adil bagi mereka. Ungkapan yang mempunyai makna dinegatifkan adalah kata 'greets' dan activists'. Dalam arti yang sesungguhnya 'greets' mempunyai makna menyapa. Dengan menyapa, membuat orang, tersenyum tetapi *greets* dalam konteks ini artinya menyelimuti/memenuhi ruang pengadilan di mana kelima aktivis itu disidang. Saat kelima aktivis itu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun oleh pengacara mereka, dianggap karena ada campur tangan dari dunia internasional dan inspeksi mengenai kasus ini namun demikian kemarahan tetap terjadi dan memenuhi ruang sidang saat vonis terjadi karena kegiatan mereka tidak dapat dikatakan sebagai tindakan makar karena tidak ada gerakan bersenjata, tidak ada pemerintahan alternative karena apa yang mereka lakukan hanyalah simbolik.

Pemilihan kata 'activists' juga bernilai negative karena mempresentasikan sebuah kelompok yang gerakan papua merdeka (OPM) yang berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI. Penggunaan kata activists berawal dari kata kerja 'activity' yang artinya kegiatan. Jadi 'activists' sendiri mempunyai arti orang-orang yang melakukan kegiatan. Interpretasi kata 'activists', adalah

gerombolan orang-orang yang beraktivitas di luar perintah resmi dari negara dalam konteks ini, activists mewakili OPM.

### **Australia Menghormati Kedaulatan Negara Indonesia**

Data (SMH/16/1/09) *Australian intruders in Papua sent to Jail*, wartawan menggunakan kata yang mengandung nilai *expressive* yaitu *intruders* dan *sent to jail*. Kedua frasa tersebut mengandung nilai ideologi karena kata *intruders* berarti penyelundup. Sebenarnya wartawan tersebut bisa menggunakan kata yang lain seperti *illegally landing* sehingga menjadi *Australians illegally landing their plane in Papua sent to jail*. Pilihan kata *illegally landing* tidak mengandung muatan politik apabila dibandingkan dengan kata *intruders* karena memang pelaku bukanlah seorang penyelundup yang sebenarnya. Demikian pula dengan pilihan frasa *sent to jail*. Frasa ini mengandung muatan ideologi karena disitu tersirat adanya sikap wartawan terhadap peristiwa ini yaitu bahwa pelaku yang terlibat pendaratan ilegal dipenjara. Dalam prosesnya kelima warga Australia tersebut masih belum menjalani hukuman penjara tetapi mereka sedang menjalani tahanan rumah.

Walaupun penulis berita tersebut berkebangsaan Australia disini kita bisa melihat bahwa SMH seolah olah beranggapan bahwa bangsa Australia adalah bangsa yang sadar akan hukum, bahwa mereka adalah bangsa yang besar dan lebih baik dari pada bangsa yang lainnya. Perspektif Ideologi semacam ini adalah facisme yaitu sebuah perspektif ideologi yang melihat dan menyadari bahwa bangsa mereka adalah yang terbaik diantara bangsa-bangsa yang ada. Perspektif ideologi ini tidak mentolerir adanya sebuah kesalahan dan perbedaan.

Sangat jelas bahwa kata *intruders* dipakai oleh SMH untuk menghukum atau mengadili kelima orang tersebut yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan nilai yang dianut bangsa Australia.

Tahap analisis selanjutnya adalah penjelasan. Pada tahap ini, penulis mencari latar belakang dari munculnya ideologi atau kepentingan yang terepresentasikan dalam berita di SMH. Apabila ditelusuri latar belakang pemilihan kata tersebut, SMH mengklaim bahwa surat kabar ini adalah surat kabar bebas dari pengaruh siapapun tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses penulisan berita ini wartawan berada di bawah penyunting dan *proprietor* sebagaimana disebutkan oleh bahwa pemilik surat kabar yang mempunyai kepentingan untuk memasukkan ideologi ke dalam berita yang ditulis oleh wartawannya

*that the owner of a newspaper has the power to influence the content of the paper. More specifically, principals overtly control and frame the ideologies of the news and the choice of linguistic terms and expressions such as whom to call a 'terrorist' and whom to call a 'guerrilla' (Schlesinger, 1987).*

Dalam negara liberal-demokrasi seperti Australia, surat kabar mempunyai kebebasan untuk menulis berita berbeda dengan surat kabar di negara komunis seperti Cina atau Korea Utara, SMH tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah Australia tetapi ada kemungkinan untuk dipengaruhi oleh pemilik SMH yang saat itu pro terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Australia adalah negara tetangga dekat Indonesia yang secara geografis dan budaya berbeda dengan Indonesia. Hal tersebut mendasari kebijakan pemerintahannya dan cara berfikir masyarakatnya yang berbeda dengan Indonesia. Kepentingan politik kedua negara Indonesia maupun Australia yang memicu perbedaan pandangan antara kedua negara terhadap konflik Papua di Indonesia. Di mata Indonesia, Australia mempunyai kepentingan politik terhadap Papua yang sangat kaya akan kekayaan alamnya sebagaimana di lakukannya terhadap Timor Timur. Dengan melihat sejarah peran Australia terhadap keberadaan Papua, Australia mempunyai kepentingan

antara lain 1) Australia mempunyai kepentingan khusus terhadap Papua yang merupakan bagian dari Papua New Guinea dan pulau ini merupakan negara terdekat Australia, yang merupakan ring pertahanan terdekat untuk menghadapi agresi "...Australia must be vitally concerned with whatever fundamental changes take place in any of these areas... The Australian people are deeply interested in what happens anywhere in New Guinea." 2) Percy Spender, menteri luar negeri pertama pada era Menzies berpendapat bahwa Papua bukan bentuk bagian dari Indonesia karena pulau ini mempunyai lebih banyak persamaan dengan Papua New Guinea "*It (Papua) is part of the one mainland, divided merely by a line drawn on a map. It is inhabited almost wholly by people of the same ethnic origin and having the same social and economic problems as those of the people of Papua and Australian New Guinea.*" (Gyngell. 2000), 3) Pada tahun 1957, Australia dan Belanda menandatangani sebuah perjanjian kerjasama antara dua administrasi daerah jajahannya. Persetujuan ini membuka kemungkinan bagi kedua pulau ini untuk bersatu dan merdeka. Sehingga Indonesia merasa harus waspada terhadap segala tindakan Australia.

Bisa dilihat disini bahwa dalam penulisan headline menyiratkan kelompok yang dapat merepresentasikan ideologi mereka. Kelompok 'us' termasuk pemerintah Australia yang mendapat dukungan dari *SMH*, aktor dalam kelompok ini disamakan tidak melakukan aktivitas yang menyinggung integritas negara lain, sedangkan kelompok 'them' termasuk pemerintah Indonesia yang secara implisit sebagai aktor dalam konflik Papua. Negara Indonesia dianggap sebagai negara yang *overreacted* dalam menghadapi sikap Australia terhadap rakyat Papua dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan nasib sendiri.

## SIMPULAN

Sesuai dengan fokus penelitian yang pertama yaitu penggunaan kosa kata atau leksikon dan sintaksis, *Sydney Morning Herald* telah menunjukkan apa yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Dari 9 headline yang telah di analisis, ideologi yang terepresentasikan melalui pemilihan leksikon dan bentuk sintaksisnya adalah Australia berkepentingan politik terhadap masalah Papua oleh sebab itu negara ini menilai bahwa hak rakyat Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia harus dihormati. Satu artikel mensiratkan bahwa Australia masih menghormati kedaulatan Indonesia. Latar belakang pemilihan kata oleh *SMH* adalah adanya pengaruh dari sejarah hubungan politik Australia dan Indonesia terutama peran Australia terhadap konflik internal Indonesia misalnya kasus Timor Timur. Australia berpendapat bahwa Papua bukan bentuk bagian Indonesia sehingga tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia dianggap wajar. Dilihat dari medianya sendiri, kepemilikan dari *SMH* sendiri tampaknya memiliki peran dalam mempromosikan ideologinya kepada pembaca. Walaupun mengklaim bahwa surat kabar ini adalah surat kabar independent yang tidak memihak pada satu partai manapun, selalu mematuhi kode etik yang telah disepakati bersama, tetapi ada satu sejarah yang tidak bisa terlepas dari *SMH* bahwa surat kabar ini kurang memberikan dukungan terhadap Indonesia dan pada dasarnya masih memihak pada pemerintah yang berkuasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power: Discourse and Power*. London: Longman.
- Gyngell. 2000. Australia Department of Foreign Affairs and Trade. *Australia and Indonesia Relationship*. Download on April, 23, 2011 in [http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Indonesia\\_brief.html](http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Indonesia_brief.html)
- Jensen, Klaus Bruhn and Nicholas W.J. 1993. *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. New York: Routledge.
- Schlesinger, P. 1987. *Putting 'reality' Together*. BBC News 2<sup>nd</sup>. London: Methuen.
- Simon, R. 2000. *Wacana dan Ideologi*. London: Lawrence and Wishart.

- Schwarzmatel, John. 2008. *Ideology and Politics*. London: Sage
- Walcott, Harry. 1994. *Transforming Qualitative Data, Description, Analysis, and Interpretation*. California: Sage.
- Yin, Robert. K .2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: the Guilford Press.